

## ***Social Construction of Village Government on the Economic Development of the Licin Village Tourist Village, Banyuwangi Regency***

### **Konstruksi Sosial Pemerintahan Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Kampung Turis Desa Licin, Kabupaten Banyuwangi**

**Juliana Bulan Pertiwi<sup>1</sup>, RizkyTrisna Putri<sup>2</sup>, Dewien Nabelah Agustin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia

Email: penulis [24040564058@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040564058@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [rizkyputri@unesa.ac.id](mailto:rizkyputri@unesa.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dewienagustin@unesa.ac.id](mailto:dewienagustin@unesa.ac.id)<sup>3</sup>.

#### **Abstract**

*The development of a tourist village in Licin Village demonstrates interesting social dynamics, as tourism growth is influenced not only by the potential of the Ijen Crater but also by how the community interprets and collectively builds an economic system. The minimal formal role of the village government in homestay management has led residents to build their own economic structure based on cooperation, equity, and solidarity. This social understanding is a crucial factor in the success of the tourism economy in Licin Village. This research used a qualitative method with Berger & Luckmann's social construction approach. Data analysis was conducted through three stages of social construction: externalization, objectivation, and internalization. The results indicate the formation of a social reality that develops through the community's social processes. First, the community constructs the tourism system as a joint venture that must be managed fairly and equitably. Second, work structures such as the homestay rotation system, role allocation, and village supervision become objective rules accepted as normal. Third, the values of solidarity, income distribution, and service ethics are ultimately internalized as the identity of the tourism village residents. Thus, the social construction of the Licin Village community forms a community-based tourism management model capable of maintaining social harmony and village economic sustainability.*

**Keywords:** social construction, tourist village, village government, homestay, tourist village.

#### **Abstrak**

Pengembangan kampung turis di Desa Licin menunjukkan dinamika sosial yang menarik karena pertumbuhan pariwisata tidak hanya dipengaruhi potensi Kawah Ijen, tetapi juga oleh cara masyarakat memaknai dan membangun sistem ekonomi secara kolektif. Minimnya peran formal pemerintah desa dalam pengelolaan homestay membuat warga membangun sendiri struktur ekonomi berbasis kerja sama, pemerataan, dan solidaritas. Pemaknaan sosial inilah yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekonomi wisata di Desa Licin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruksi sosial Berger & Luckmann. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi,

dan internalisasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pembentukan realitas sosial yang berkembang melalui proses sosial warga. Pertama, masyarakat mengkonstruksi sistem wisata sebagai usaha bersama yang harus dikelola secara adil dan merata. Kedua, struktur kerja seperti sistem giliran homestay, pembagian peran, dan pengawasan desa menjadi aturan objektif yang diterima sebagai kewajiban. Ketiga, nilai solidaritas, pemerataan pendapatan, serta etika layanan akhirnya terinternalisasi sebagai identitas warga desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa, konstruksi sosial masyarakat Desa Licin membentuk model pengelolaan wisata berbasis komunitas yang mampu menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan ekonomi desa.

**Kata kunci:** konstruksi sosial, desa wisata, pemerintah desa, homestay, kampung turis.

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan potensi alam, tetapi juga merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi, negosiasi, serta pembentukan makna bersama antar aktor di dalam masyarakat. Pemerintahan desa, masyarakat, dan pelaku ekonomi lokal saling berinteraksi dalam membangun pemahaman mengenai arah pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata. Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata desa tidak semata-mata bersifat teknokratis, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi relasi kekuasaan, modal sosial, serta praktik komunikasi sehari-hari (Berger & Luckmann, 1966). Perspektif ini menempatkan desa sebagai ruang sosial di mana kebijakan, wacana, dan praktik governance berperan penting dalam membentuk realitas sosial mengenai pariwisata.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam membimbing bagaimana pariwisata dipahami, diatur, dan dijalankan oleh masyarakat. Melalui kebijakan, regulasi lokal, dan

pembentukan kelembagaan seperti BUMDes, pemerintah desa bertindak sebagai agen yang mengonstruksi narasi pembangunan dan memobilisasi sumber daya lokal. Hal ini terlihat pada Desa Licin, pintu masuk utama menuju destinasi wisata Kawah Ijen, yang telah mengalami transformasi sosial-ekonomi signifikan seiring berkembangnya kampung turis. Pertumbuhan homestay, usaha wisata lokal, dan peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya ditentukan oleh pasar, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah desa menarasikan pariwisata sebagai strategi ekonomi kolektif, serta mengorganisasi partisipasi masyarakat melalui keputusan desa dan praktik tata kelola hariannya (Su et al., 2020; Goodwin, 2021).

Data Dinas Pariwisata Banyuwangi (2023) menunjukkan peningkatan wisatawan sebesar 28% dalam empat tahun terakhir, diikuti pertumbuhan usaha wisata lokal hingga 31%. Namun perkembangan tersebut tidak selalu berjalan linier. Fragmentasi peran muncul ketika sebagian warga mengembangkan usaha wisata secara mandiri, sementara pemerintah desa berupaya mengintegrasikan aktivitas tersebut ke dalam kelembagaan formal. Situasi ini menggambarkan adanya

perbedaan konstruksi sosial antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai apa yang disebut “pariwisata desa.” Ketegangan antara struktur formal dan inisiatif warga memperlihatkan bahwa realitas sosial pariwisata bukan sekadar hasil kebijakan, tetapi merupakan proses negosiasi berkelanjutan di tingkat lokal.

Secara teoritis, analisis terhadap konstruksi sosial pemerintahan desa merujuk pada konsep eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1966), di mana pemerintah desa tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk makna dan praktik pariwisata melalui bahasa, simbol, dan kebijakan. Sementara secara normatif, UU Desa No. 6/2014 dan Permendes No. 7/2020 menekankan pentingnya governance yang partisipatif dan kolaboratif. Literatur global juga menegaskan bahwa destinasi wisata komunitas cenderung berhasil ketika governance lokal bersifat inklusif, adaptif, dan berbasis modal sosial (Aznar, 2019; Jamal & Stronza, 2020; Su et al., 2020). Studi World Bank (2023) bahkan menunjukkan bahwa desa dengan tata kelola inklusif dapat meningkatkan pendapatan warga hingga 35% lebih cepat.

Namun demikian, kajian empiris mengenai pariwisata desa selama ini cenderung lebih fokus pada aspek ekonomi dan modal sosial masyarakat, sementara dimensi bagaimana pemerintah desa membangun konstruksi sosial terhadap pengembangan kampung turis masih jarang dibahas. Penelitian terdahulu menekankan governance lokal sebagai faktor penting (Jamal & Stronza, 2020; Stone & Nyaupane, 2021), tetapi belum

banyak yang mengupas bagaimana pemerintah desa memaknai, mendingkai, dan mengarahkan pariwisata melalui proses sosial dan relasi kekuasaan. Di Indonesia sendiri, kajian tentang BUMDes lebih banyak bersifat teknis dan administratif dan belum melihatnya sebagai arena konstruksi sosial yang melibatkan negosiasi kepentingan, identitas, dan modal sosial masyarakat (Nuraini et al., 2022). Selain itu, studi Maharani (2022) menemukan bahwa desa wisata yang bergantung pada destinasi besar seperti Kawah Ijen menghadapi tantangan dalam membangun identitas wisata yang mandiri dan berkelanjutan.

Melihat dinamika tersebut, penelitian mengenai Desa Licin menjadi relevan dan penting. BPS Banyuwangi (2023) mencatat bahwa sektor pariwisata berkontribusi 17,6% terhadap perekonomian kawasan Glagah-Licin, mengubah struktur pekerjaan, pola konsumsi, hingga mobilitas sosial masyarakat. Namun pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa, sehingga memunculkan ruang negosiasi antara aktor formal dan informal. Celah penelitian terlihat pada minimnya kajian yang menelaah bagaimana konstruksi sosial pemerintah desa terbentuk, dinegosiasikan, dan diarahkan dalam pengembangan kampung turis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah Desa Licin membangun, mengarahkan, dan menegosiasikan konstruksi sosial dalam pengembangan ekonomi kampung turis, termasuk relasi yang terbentuk antara pemerintah desa, BUMDes, dan

masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi studi pembangunan desa dan governance pariwisata, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk mewujudkan pengelolaan kampung turis yang inklusif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pemaknaan dan praktik sosial para aktor dalam pengembangan kampung turis di Desa Licin. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, dengan fokus pada proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam pembentukan makna pariwisata.

Penelitian dilaksanakan di Dusun Glodok, Desa Licin, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, yang dipilih secara purposive karena menjadi pintu masuk utama menuju Kawah Ijen dan berkembang sebagai kampung turis berbasis masyarakat. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling, meliputi perangkat desa, pengurus BUMDes, pelaku wisata lokal, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam aktivitas pariwisata.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi berperan-serta, dan studi dokumentasi. Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, peneliti menjelaskan tujuan, prosedur, serta penggunaan data penelitian kepada seluruh informan. Partisipasi dilakukan secara sukarela setelah melalui proses informed consent. Informan diberikan pilihan

untuk tetap anonim atau mencantumkan identitas mereka dalam publikasi, dan nama yang dicantumkan dalam artikel ini telah memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan.

Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan temuan ke dalam tahapan eksternalisasi, objektivasi, serta internalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Licin merupakan salah satu desa penyangga utama kawasan wisata Kawah Ijen yang secara administratif berada di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Secara geografis, desa ini terletak di jalur utama menuju kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen dan menjadi titik singgah strategis bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Posisi tersebut menjadikan Desa Licin sebagai bagian penting dalam rantai ekonomi pariwisata Ijen, khususnya dalam penyediaan akomodasi alternatif berbasis masyarakat (community-based tourism), seperti homestay.

Dalam konteks ini, pengelolaan homestay tidak dapat dilepaskan dari dinamika tata kelola dan relasi antar aktor di tingkat desa. Struktur ekonomi wisata yang berkembang menunjukkan adanya arena negosiasi dan koordinasi antara warga, pengelola homestay, serta pemerintah desa. Pola ini sejalan dengan temuan Putri, Sjaf, dan Wahyuni (2021) yang menegaskan bahwa desa merupakan ruang kontestasi sekaligus kolaborasi antar aktor dalam mengelola

sumber daya dan kepentingan ekonomi lokal. Di Desa Licin, relasi tersebut tidak bersifat hierarkis, melainkan lebih cair melalui koordinasi informal dan kesepakatan kolektif.

Dari sisi ekonomi politik, berkembangnya homestay sebagai sumber pendapatan alternatif memperlihatkan bagaimana desa merespons peluang eksternal melalui penguatan kapasitas internal masyarakat. Distribusi manfaat yang relatif merata melalui sistem rotasi dan pembagian peran menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan akses ekonomi. Kondisi ini mencerminkan pentingnya struktur sosial dalam menentukan arah distribusi sumber daya, sebagaimana dibahas oleh Harianto et al. (2025) bahwa dinamika ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh pasar, tetapi juga oleh relasi sosial dan mekanisme kolektif yang mengaturnya.

Selain itu, keberhasilan pengelolaan homestay juga tidak terlepas dari peran aktor lokal dalam mendorong partisipasi dan adopsi praktik bersama. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa perubahan praktik ekonomi di tingkat desa sangat bergantung pada proses pendampingan, penyuluhan, serta pembelajaran sosial antarwarga. Hal ini sejalan dengan Putri (2018) yang menekankan pentingnya peran aktor penggerak lokal dalam memfasilitasi adopsi inovasi dan memperkuat kohesi

kelompok dalam konteks pembangunan pedesaan.



**Gambar 1.** Peta Desa Licin, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Sumber: commons.wikimedia.org

Dalam peta pariwisata Kawah Ijen, Desa Licin berperan sebagai desa transit sekaligus desa tujuan wisata berbasis pengalaman lokal. Selain menawarkan akses yang relatif dekat ke Kawah Ijen, desa ini juga mengembangkan daya tarik berbasis budaya dan kehidupan pedesaan, seperti pertanian, kuliner lokal, serta interaksi sosial antara warga dan wisatawan. Karakter ini memperkuat identitas Desa Licin sebagai destinasi wisata berbasis komunitas yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi pariwisata.

Berkembangnya praktik ekonomi berbasis homestay di Desa Licin tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses sosial yang

bertahap. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi berbasis homestay di Desa Licin terbentuk melalui tiga proses konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Pada tahap eksternalisasi, masyarakat mulai merespons meningkatnya arus wisatawan Kawah Ijen dengan mengubah sebagian ruang domestik menjadi ruang ekonomi melalui penyediaan homestay. Pada tahap objektivasi, praktik tersebut menjadi pola yang terlembagakan ditandai dengan adanya standar pelayanan, jaringan promosi, serta pengakuan sosial bahwa homestay merupakan sumber mata pencaharian yang sah. Selanjutnya, pada tahap internalisasi, nilai-nilai ekonomi pariwisata dan kesadaran kolektif tentang pentingnya pelayanan wisata diinternalisasi oleh warga sebagai bagian dari identitas sosial dan strategi keberlanjutan ekonomi desa.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik ekonomi homestay di Desa Licin membentuk pola sosial-ekonomi yang ditandai oleh pembagian kerja yang relatif adil, partisipasi aktif warga, dan solidaritas sosial yang kuat. Data wawancara dengan Abdul, Wafa, dan Ida mengungkap bahwa distribusi tamu dilakukan melalui mekanisme rotasi dan kesepakatan bersama untuk menghindari monopoli serta menjaga pemerataan pendapatan. Ketua BUMDes menjelaskan bahwa lembaga desa berperan sebagai koordinator reservasi dan promosi, sehingga akses terhadap wisatawan tidak hanya bergantung pada jaringan pribadi pemilik homestay. Sekretaris Desa

(Hariyanto) menegaskan bahwa pengembangan homestay dibahas melalui musyawarah desa, yang menunjukkan adanya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan.

Solidaritas sosial tercermin dari praktik saling bantu antar-pemilik homestay ketika terjadi lonjakan tamu atau kendala operasional, serta minimnya konflik terkait pembagian tamu. Persepsi wisatawan yang diwawancarai juga memperkuat temuan ini, karena mereka menilai suasana desa bersifat kekeluargaan dan kolaboratif. Jika dibandingkan dengan studi terdahulu mengenai pariwisata berbasis komunitas, pola di Desa Licin menunjukkan kesesuaian dengan indikator utama *community-based tourism*, yakni partisipasi lokal, distribusi manfaat ekonomi yang relatif merata, dan penguatan kohesi sosial. Dengan demikian, praktik homestay di Desa Licin dapat dipahami sebagai bentuk ekonomi kolektif yang dilembagakan dalam struktur sosial desa.

## **1. Eksternalisasi: Nilai Keadilan dan Kerja Sama Sebagai Landasan Awal**

Tahap eksternalisasi tampak ketika masyarakat mulai mencurahkan gagasan mengenai pentingnya pemerataan kerja dalam pengelolaan homestay. Nilai keadilan muncul sebagai konsep dasar yang disepakati bersama dalam mengembangkan ekonomi wisata desa. Peningkatan ekonomi warga yang dalam beberapa kasus disebut mencapai 90% dipahami

sebagai hasil dari mekanisme pembagian kerja yang relatif merata dan pembagian peran yang terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat. Pembagian kerja tersebut tidak hanya diwujudkan melalui sistem distribusi tamu secara rotasi, tetapi juga melalui keterlibatan warga dalam berbagai fungsi pendukung pariwisata, seperti penyediaan transportasi, pemanduan, konsumsi, serta layanan operasional lainnya. Dengan demikian, partisipasi warga tidak terbatas pada penerimaan manfaat ekonomi, melainkan mencakup keterlibatan aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak tahap awal, kerja sama dan pemerataan kesempatan telah menjadi norma kolektif dalam pembangunan kampung turis di Desa Licin.



**Gambar 1.** Warga dusun Glodok menemani turis berkeliling di Desa Licin.

Dokumentasi pribadi,  
(Juliana, September, 2025)

(Saragih & Sipayung, 2020) menjelaskan bahwa tahap awal pembentukan pariwisata berbasis komunitas di Karo berangkat dari gagasan pemerataan manfaat ekonomi serta kerja sama antarwarga sebagai respons terhadap peluang wisata.

Sejalan dengan itu, (Napitupulu, 2021) menegaskan bahwa nilai keadilan dan kolaborasi menjadi pondasi utama dalam pembentukan struktur ekonomi pariwisata desa. Berangkat dari kerangka tersebut, penelitian ini menelaah apakah pola serupa juga terbentuk dalam praktik ekonomi homestay di Desa Licin. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan homestay di desa ini memang ditopang oleh mekanisme pembagian tamu secara rotasi, koordinasi melalui BUMDes, serta kesepakatan kolektif untuk menjaga pemerataan pendapatan. Wawancara dengan warga dan perangkat desa memperlihatkan bahwa prinsip kerja sama dan keadilan bukan sekadar wacana, melainkan telah dilembagakan dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, kasus Desa Licin memperkuat sekaligus memperluas temuan sebelumnya mengenai pentingnya nilai kolaboratif dalam membangun struktur ekonomi pariwisata berbasis komunitas. Bahkan (Jamal & Stronza, 2020) menyatakan bahwa nilai dasar seperti pemerataan dan kolaborasi menjadi titik tolak penting dalam pariwisata berbasis komunitas di berbagai negara.

Proses eksternalisasi di Desa Licin menunjukkan bahwa nilai keadilan dan kerja sama tidak berhenti pada tataran gagasan, melainkan menjadi dasar konkret dalam pembentukan sistem ekonomi wisata yang relatif merata.

## **2. Objektivasi: Sistem Bergilir, Pembagian Peran, dan Peran Pengawasan Desa**

Objektivasi terjadi ketika nilai-nilai awal berubah menjadi aturan dan praktik sosial. Di Desa Licin, objektivasi tampak melalui sistem kerja bergilir, pembagian peran ekonomi, dan peran pemerintah desa sebagai pengawas. Ida menyatakan bahwa *“sistem ini membantu warga ekonomi bawah, karena semua dapat giliran kerja,”* menunjukkan bahwa pemerataan sudah menjadi mekanisme objektif yang mengatur distribusi pekerjaan dan pendapatan.



**Gambar 2.** Pengelola Kampung Turis bersama pengunjung Homestay.  
Dokumentasi pribadi,  
(Juliana, September, 2025)

Pembagian peran ekonomi juga terlihat jelas dalam jasa laundry, katering, transportasi, dan pemandu wisata yang diberikan kepada warga secara merata dan berdasarkan kesepakatan bersama. Pembagian yang merata tersebut tidak berarti semua warga menjalankan jenis usaha yang sama, melainkan distribusi kesempatan usaha dilakukan melalui mekanisme yang disepakati bersama agar tidak terjadi monopoli oleh pihak tertentu. Misalnya, dalam jasa pemandu wisata dan transportasi, diterapkan sistem giliran (rolling system) sehingga setiap anggota yang terdaftar memperoleh

kesempatan melayani wisatawan secara bergantian. Pada usaha katering dan laundry, pengelolaan biasanya dibagi berdasarkan kelompok atau keluarga yang telah terdata, dengan pembagian pesanan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing agar pendapatan tersebar relatif seimbang.

Selain itu, kesepakatan bersama juga mengatur standar harga, kualitas layanan, dan pembagian hasil sehingga tercipta keadilan dan transparansi. Mekanisme ini biasanya diputuskan melalui musyawarah warga atau forum kelompok sadar wisata, sehingga setiap keputusan memiliki legitimasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa, pembagian peran ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjaga harmoni sosial, mencegah kecemburuan, dan memperkuat rasa memiliki terhadap pengelolaan pariwisata desa.

Penjelasan dari Ketua BUMDes menunjukkan bahwa meskipun unit homestay tidak sepenuhnya berada di bawah pengelolaan formal BUMDes, perkembangan ekonomi desa tetap berjalan secara positif karena ditopang oleh solidaritas antar warga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberfungsian struktur ekonomi desa tidak semata-mata bergantung pada kelembagaan formal, melainkan pada adanya kepercayaan sosial dan ketergantungan positif antar aktor lokal. Dalam dinamika yang terbentuk, relasi sosial yang berbasis solidaritas menjadi elemen penting yang menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi kampung turis di Desa Licin.

Peran pemerintah desa dalam pengelolaan kampung turis bersifat sebagai pengawas dan fasilitator, bukan

aktor dominan. Pemerintah desa menjalankan fungsi pemantauan dan menerima masukan, sementara operasional homestay dikelola secara mandiri oleh warga. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi wisata di Desa Licin bertumpu pada inisiatif kolektif masyarakat, dengan pemerintah desa berperan menjaga stabilitas sistem.

Temuan ini didukung oleh penelitian (Stone & Nyaupane, 2021), yang menyatakan bahwa objektivasi nilai paling terlihat dalam pembentukan praktik sosial seperti sistem kerja, pembagian peran, dan mekanisme pengawasan. (Su et al., 2020) juga menegaskan bahwa governance desa yang memberi ruang pada otonomi komunitas justru memperkuat keberlanjutan pariwisata. (Goodwin, 2021) menambahkan bahwa struktur kerja berbasis solidaritas merupakan ciri khas pariwisata komunitas yang sukses.

Objektivasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Desa Licin berfungsi efektif karena aturan sosial telah diinternalisasi menjadi rutinitas bersama.

### **3. Internalisasi: Solidaritas, Pemerataan, dan Etika Layanan sebagai Identitas Kolektif**

Internalisasi terjadi ketika warga tidak lagi memandang struktur sosial sebagai aturan eksternal yang harus dipatuhi, melainkan sebagai nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman dalam bertindak. Struktur seperti sistem bergilir, pembagian kesempatan

kerja, dan kesepakatan pemerataan pendapatan yang sebelumnya terbentuk melalui proses sosial, secara perlahan meresap ke dalam kesadaran individu. Pada tahap ini, warga menjalankan sistem tersebut bukan karena tekanan sosial atau pengawasan kelompok, tetapi karena mereka merasa sistem itu benar, adil, dan sesuai dengan kepentingan bersama.

Internalisasi terjadi ketika warga menyerap struktur sosial tersebut sebagai nilai pribadi dan identitas kolektif. Ida menyebut bahwa sistem bergilir "*membuat warga kecil merasa dihargai,*" yang menunjukkan adanya transformasi makna pada tingkat personal. Sistem bergilir tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme teknis pembagian kerja, tetapi sebagai simbol pengakuan sosial terhadap warga yang memiliki keterbatasan modal, akses, atau kekuatan ekonomi.

Rasa dihargai tersebut memperkuat martabat sosial individu dan menumbuhkan kepercayaan bahwa setiap orang memiliki posisi yang setara dalam struktur ekonomi desa. Dalam konteks ini, solidaritas tidak lagi dipraktekkan karena kewajiban normatif semata, melainkan karena telah menjadi keyakinan personal yang diyakini membawa kebaikan bersama. Wafa dan Abdul menekankan bahwa pemerataan adalah syarat keharmonisan ekonomi desa nilai yang kini menjadi pedoman moral masyarakat.



**Gambar 3.** Kegiatan warga yang mengajak pengunjung Homestay. Dokumentasi pribadi, (Juliana, September, 2025)

Etika layanan di Desa Licin tidak hanya dipahami sebagai standar operasional dalam melayani wisatawan, tetapi telah berkembang menjadi nilai yang melekat dalam perilaku sehari-hari warga. Etika layanan ini mencakup sikap ramah, komunikasi yang sopan, ketepatan waktu, kerapian penampilan, kejujuran dalam transaksi, serta tanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan wisatawan. Nilai-nilai tersebut tidak semata-mata diajarkan sebagai aturan formal, melainkan tumbuh melalui proses pembiasaan dan pengawasan sosial yang berlangsung terus-menerus dalam praktik pariwisata desa.

Pernyataan wisatawan Julia yang menyebut bahwa layanan di Desa Licin terasa "*rapi dan ramah*" menunjukkan bahwa standar pelayanan tersebut tidak hanya dirasakan secara internal oleh masyarakat, tetapi juga diakui oleh pihak luar. Kerapian di sini tidak sekadar berarti penampilan fisik, melainkan juga keteraturan sistem pelayanan mulai dari penyambutan

tamu, pengaturan jadwal, hingga koordinasi antarwarga. Sementara itu, keramahan mencerminkan sikap terbuka dan penghormatan terhadap tamu sebagai bagian penting dari pengalaman wisata. Respons positif dari wisatawan menjadi indikator bahwa etika layanan telah terwujud secara konsisten dalam praktik.

Lebih jauh, internalisasi etika layanan menunjukkan bahwa warga tidak lagi melayani karena dorongan kewajiban ekonomi semata. Profesionalitas telah menjadi bagian dari identitas desa wisata, sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga citra bersama. Ketika seseorang melayani dengan baik, ia tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga nama desa. Kesadaran kolektif ini memperkuat kontrol sosial secara tidak langsung, karena kualitas layanan dianggap sebagai representasi kehormatan komunitas.

Etika layanan di Desa Licin berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan ekonomi dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Profesionalitas tidak diposisikan sebagai praktik modern yang terpisah dari budaya lokal, melainkan diintegrasikan dengan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan rasa hormat. Integrasi tersebut menjadikan praktik pelayanan tidak bersifat mekanis, tetapi mencerminkan nilai yang telah terinternalisasi dalam identitas kolektif masyarakat desa wisata.

Temuan ini diperkuat oleh (Goodwin, 2021), yang menyatakan bahwa solidaritas dan etika layanan menjadi ciri utama destinasi wisata

komunitas yang bertahan lama. (Stone & Nyaupane, 2021) juga menyebut bahwa internalisasi nilai moral seperti keadilan dan kerja sama membuat sistem ekonomi komunitas lebih stabil.

Proses internalisasi di Desa Licin membentuk identitas kolektif sebagai masyarakat desa wisata yang menempatkan kerukunan, profesionalitas, dan keadilan sebagai nilai bersama dalam praktik ekonomi sehari-hari.

## **KESIMPULAN**

Konstruksi sosial masyarakat Desa Licin terhadap sistem pengelolaan kampung turis terbentuk melalui pengalaman kolektif, solidaritas sosial, kerja sama antarwarga, serta praktik pengelolaan pariwisata yang dilakukan secara bersama dan didukung koordinasi informal dengan pemerintah desa. Masyarakat meyakini bahwa pariwisata Kawah Ijen hanya dapat memberikan manfaat yang adil apabila dikelola secara kolektif, sehingga lahirlah sistem kerja bergilir, pembagian peran, musyawarah, dan gotong royong sebagai bentuk pelembagaan nilai kebersamaan. Praktik tersebut kemudian terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari hingga nilai solidaritas, pemerataan pendapatan, dan tanggung jawab sosial terinternalisasi menjadi bagian dari kesadaran dan identitas masyarakat Desa Licin sebagai desa wisata berbasis komunitas. Pariwisata tidak lagi dimaknai semata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai ruang bersama yang mencerminkan jati diri dan komitmen kolektif warga. Temuan ini sejalan dengan teori

konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, sehingga konstruksi sosial yang berkembang di Desa Licin tidak hanya menciptakan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan identitas komunitas.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstruksi sosial praktik ekonomi homestay di Desa Licin, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi penelitian dan pengembangan selanjutnya. Pertama, penelitian mendatang perlu menelaah lebih dalam dinamika relasi kekuasaan antara pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok masyarakat lain yang belum terlibat aktif, karena penelitian ini belum menggambarkan secara utuh proses negosiasi di balik pengambilan keputusan. Kedua, sistem kerja bergilir terbukti efektif, namun belum diteliti bagaimana mekanisme penyelesaian konflik internal warga ketika terjadi perbedaan kepentingan. Studi lanjutan penting untuk melihat stabilitas solidaritas desa dalam jangka panjang. Ketiga, proses internalisasi etika pelayanan telah terlihat kuat, namun penelitian mendatang perlu menggali bagaimana nilai tersebut diwariskan kepada generasi muda, mengingat keberlanjutan desa wisata sangat bergantung pada regenerasi aktor lokal. Keempat, cakupan penelitian masih berfokus pada homestay, sehingga sektor wisata lainnya seperti jasa pemandu, transportasi, dan UMKM perlu diteliti lebih lanjut untuk

memberikan gambaran ekosistem pariwisata desa secara lebih menyeluruh. Terakhir, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan campuran atau perbandingan antar desa wisata untuk memperkaya analisis serta melihat perbedaan model konstruksi sosial dalam konteks pariwisata berbasis komunitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affifudin, & Saebani, B. A. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Pustaka.
- Aznar, A. (2019). *Rural tourism governance and social capital: A framework for sustainable development*. Emerald Insight.
- BPS Banyuwangi. (2023). *Statistik pariwisata dan ekonomi kawasan Glagah-Licin tahun 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Dinas Pariwisata Banyuwangi. (2023). *Laporan kunjungan wisata Banyuwangi 2023*. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Goodwin, H. (2021). Community-based tourism and governance challenges. *Tourism Review*, 76(4), 812-826. <https://doi.org/10.1108/TR-10-2020-0512>
- Hariato, S., Putri, R. T., Pribadi, F., Agustin, D. N., & Jie, F. (2025). The political economy of fertilizer scarcity: Social and economic implications for smallholder agriculture in Indonesia. *Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society*, 13(2).
- Maharani, S. (2022). Dependency on flagship tourism destinations and implications for village tourism development. *Tourism and Society Journal*, 7(2), 144-160.
- Nuraini, F., Prabowo, T., & Salim, M. (2022). BUMDes as a socio-political arena in rural development. *Indonesian Journal of Public Policy*, 5(1), 44-58.
- Su, M., Wall, G., & Wang, Y. (2020). Governance quality and sustainability of community-based tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(6), 927-944. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1707213>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir sosial atas kenyataan: Sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan* (H. Basari, Penerj.). Jakarta: LP3ES.
- Jamal, T., & Stronza, A. (2020). Collaboration theory and tourism practice in protected areas: Stakeholders, structuring, and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(10), 1475-1494. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1742725>
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan desa wisata 2023*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

- tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Pretty, J. (2019). Social capital and the collective management of resources. *Science*, 302(5652), 1912–1914.  
<https://doi.org/10.1126/science.1090847>
- Putri, R. T. (2018). Peran penyuluh pertanian terhadap penerapan teknologi tanam jajar legowo 2:1 (Kasus Kelompok Tani Gotong Royong 2 di Desa Klaseman, Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 2(3).
- Putri, R. T., Sjaf, S., & Wahyuni, E. S. (2021). Actor contestation in village fund management. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3).
- Santo, R., Ribeiro, H., & Schmidt, L. (2020). Community-based ecotourism and social capital: Insights from local participation. *Journal of Ecotourism*, 19(3), 215–233.  
<https://doi.org/10.1080/14724049.2019.1659804>
- Stone, M. T., & Nyaupane, G. (2021). Local governance and community participation in sustainable tourism. *Annals of Tourism Research*, 89, 103208.  
<https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103208>
- World Bank. (2023). *Village resilience and social capital report 2023*. Washington, DC: World Bank.
- Zhang, H. (2022). Social networks and community empowerment in rural tourism development. *Tourism Management*, 88, 104401.  
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104401>
- Zhang, Y., & He, L. (2021). Social capital and residents' participation in rural tourism: Evidence from ecotourism villages. *International Journal of Tourism Research*, 23(4), 567–579.  
<https://doi.org/10.1002/jtr.2418>